

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Media Publishing, Malang
- Adrian, S., 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Ahmad & Heryani, 2011., *W., Azas-Azas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama Cetakan ke 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Budi Harsono., 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djembatan, Jakarta
- Fachridin I., 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Hans Kelsen., 2014, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media
- Irwan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkota, Surabaya
- Lotulung, P.E., 1994, *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Manan B., 2000, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional, Bandung
- Maria S.W Somardjono, 1997, "Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti," *Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanian, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*, Jakarta, 6 Agustus 1997
- Maria S.W, Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta
- Mhd Yamin Lubis & Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung
- Parlindungan, A.P. 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* Mandar Maju Bandung
- Petrus E., 2018, *Efektifitas Fungsi Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Kota Makassar*, Tesis, Universitas Bosowa, Makasar

Putri, A.F., 2012, *Kepastian Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak milik Atas Tanah Terhadap Gugatan Dari Pihak Lain*, Tesis, Universitas Indonesia

R. Supomo. 1958., "*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*". Penerbit Fasco, Jakarta

R. Subekti., *Hukum Pembuktian*. Penerbit Pradnyparamita, Jakarta

Suardita, I.K., 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Suhadi Dan Rofi Wahasisa, 2008, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Sukanto, S, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Sutedi, A, 2012, *Sertipikat Hak Atas tanah*, Jakarta, Sinar Grafika

Toga, A.M, 2017, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta

Van Apeldoorn., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan ke 24, Jakarta Pradnya Paramita

Vika, M.H., 2019, *Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertipikat Ganda*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 272 K/TUN/2022

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 204/B/PT.TUN.MDN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor, 9/G/2021/PTUN.PDG

### C. Jurnal Ilmiah

Haris Yonatan,P.S, 2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Pertama Kali*, Jurnal Negara Hukum Vol 2 No.2

Haryati, 2007, Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Volume 5, Nomor 1

Hirwansyah, 2021, *Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertipikat Ganda*, Jurnal Hukum Sasana Volume 7, Nomor 1, Universitas Bahyangkara, Jakarta Raya

Prayogo,R.T., 2016, “Penerapan azas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” 13:02, *Jurnal Legislasi Indonesia*

Ridwansyah, M., 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” 13:02, *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Wantu F.M., 2007, “Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim,” 19:3, *Jurnal Mimbar Hukum*

#### **D. Website**

Website databoks; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062> (terakhir kali dikunjungi pada 18 Mei 2023)

